



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PP 39
TRIWULAN I
TAHUN 2021

INSPEKTORAT JENDERAL

Kementerian
Perindustrian

NOTA DINAS

Nomor : 132/IJ-IND/PR/IV/2021

Yth : Menteri Perindustrian
Dari : Inspektur Jenderal
Hal : Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Inspektorat Jenderal Triwulan I Tahun 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 15 April 2021

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian, dengan ini kami laporkan bahwa capaian realisasi penyerapan anggaran pada Inspektorat Jenderal pada Triwulan I Tahun 2021 yaitu Rp 4,723,590,306,- atau sebesar 11.92 % dari pagu Rp 39,643,630,000,-

Demikian kami laporkan, atas perkenan dan arahan Bapak Menteri kami sampaikan terima kasih.

INSPEKTUR JENDERAL



MASROKHAN

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal;
2. Para Inspektur.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamiin, puji syukur kami munajatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan nikmat kesehatan kepada seluruh pegawai Inspektorat Jenderal. Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Inspektorat Jenderal Triwulan I Tahun 2021 telah selesai disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Jenderal yang telah saling mendukung dan bekerja keras sehingga tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dapat terlaksana dengan baik.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Inspektorat Jenderal, dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja Kementerian Perindustrian.

Jakarta, April 2021

INSPEKTUR JENDERAL



MASROKHAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal	1
I.2. Latar Belakang Kegiatan/Program	1
I.3. Struktur Organisasi.....	2
BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN	8
A. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal	8
B. Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal	10
C. Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2021.....	10
D. Rencana Aksi	13
E. Informasi Kinerja dan Realisasi Inspektorat Jenderal Tahun 2021	23
BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN	30
III.1. Analisa Hasil Capaian dan Anggaran.....	30
III.2. Kegiatan Inspektorat Jenderal.....	33
BAB IV. PENUTUP.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal	10
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021	10
Tabel 3	Program Inspektorat Jenderal	10
Tabel 4	Rencana Aksi dan Realisasi Kegiatan Inspektorat Jenderal Triwulan I Tahun 2021	13
Tabel 5.	Informasi Kinerja Berdasarkan Perkin Inspektorat Jenderal Tahun 2020	23
Tabel 6.	Realisasi Keuangan Inspektorat Jenderal Triwulan I Tahun 2021	31
Tabel 7	Realisasi Anggaran Berdasarkan data SPAN 31 Maret 2021	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal	2
Gambar 2.	Bagan Organisasi Inspektorat I	4
Gambar 3.	Bagan Organisasi Inspektorat II	5
Gambar 4.	Bagan Organisasi Inspektorat III	6
Gambar 5.	Bagan Organisasi Inspektorat IV	7

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

I.2. Latar Belakang Kegiatan/Program

Agar fungsi - fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program/kegiatan tahun 2021 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal ditujukan untuk mendukung kelancaran administrasi dan manajemen pengawasan untuk mewujudkan upaya:

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi *Post Audit*, tetapi juga sebagai *Consulting Partner* (mitra konsultasi) dan sebagai *Quality Assurance* (penjamin mutu) kegiatan unit kerja.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

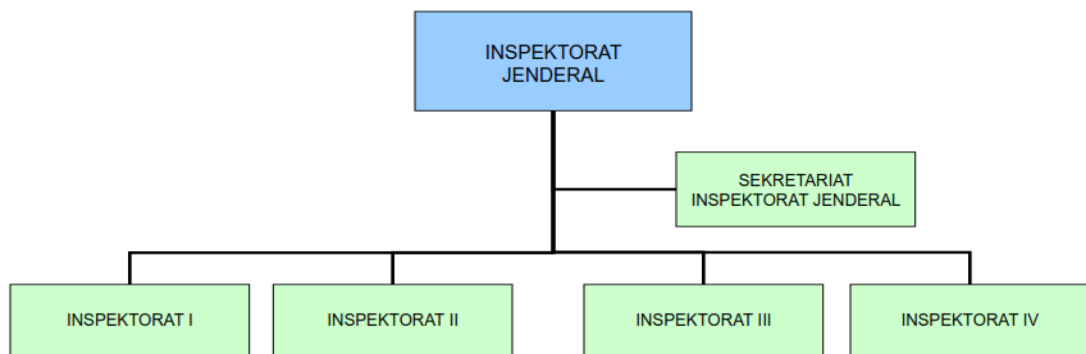
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

I.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian pasal 169, Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- Inspektorat I;
- Inspektorat II;
- Inspektorat III; dan
- Inspektorat IV.

Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a) Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
- b) Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang pengawasan;
- c) koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, penelaahan hukum, perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang pengawasan;
- d) koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, pengelolaan, analisis, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern serta evaluasi hasil pengawasan;
- e) koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan Inspektorat Jenderal;
- f) pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Inspektorat Jenderal; dan
- g) pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas :

- a. Bagian umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

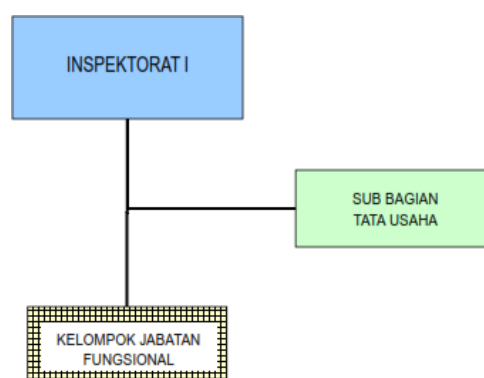
- Pelaksanaan urusan rumah tangga, barang milik negara, dan tata usaha inspektorat jenderal; dan
- Pelaksanaan urusan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal

1) Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha
 - Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, Program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
 - Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior (minimal Auditor Madya) yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal. Jumlah Auditor pada Inspektorat I sebanyak 15 orang, yang terdiri dari:
 - a) Auditor Utama: 1 orang;
 - b) Auditor Madya: 1 orang;
 - c) Auditor Muda: 6 orang;
 - d) Auditor Pratama: 7 orang.
 - Bagan Organisasi Inspektorat I adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Bagan Organisasi Inspektorat I

2) Inspektorat II

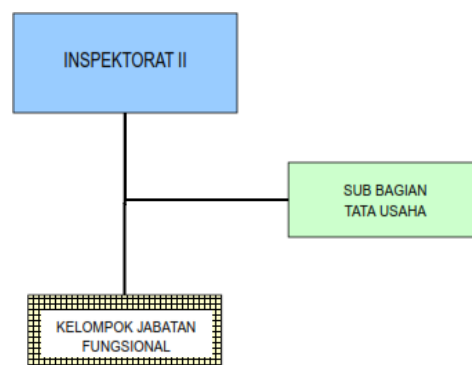
Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka. Inspektorat II terdiri dari :

1. Sub Bagian Program Tata Usaha
 - Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, Program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
 - Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Pada tahun 2021 ini, Inspektorat II memiliki 18 (delapan belas) orang pegawai yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) orang Inspektur;
- b) 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha;
- c) Auditor: 14 orang;
- d) Pelaksana: 2 orang.

Bagan organisasi Inspektorat II adalah sebagai berikut :



Gambar 3. Bagan Organisasi Inspektorat II

3) Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Inspektorat III terdiri dari :

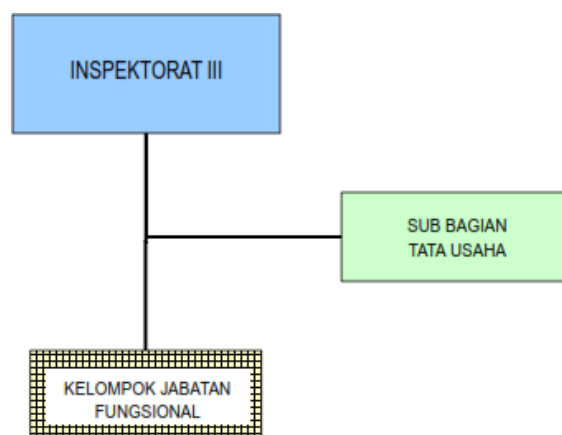
1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan organisasi Inspektorat III adalah sebagai berikut :



Gambar 4. Bagan Organisasi Inspektorat III

4) Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Perwakilan Kementerian Perindustrian di Luar Negeri.

Inspektorat IV terdiri dari :

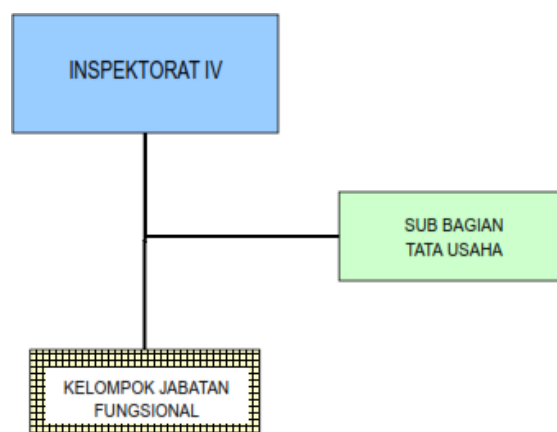
1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan organisasi Inspektorat IV adalah sebagai berikut :



Gambar 5. Bagan Organisasi Inspektorat IV

BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa terdapat dua agenda pembangunan yang melibatkan peran penting industri yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas” dan “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Agenda pemerintah ini dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan akan dilakukan Kementerian Perindustrian yang tertuang pada Renstra Kemenperin 2020-2024, salah satunya adalah kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri dan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan “Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian”. Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pengawasan sebagai berikut:

1. Visi

Visi Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian mempunyai visi yang sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Inspektorat Jenderal mengemban misi yang sama dengan Kementerian Perindustrian maupun Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

3. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Inspektorat Jenderal selaras dengan tujuan Kementerian Perindustrian, yaitu *“Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional”* yang bercirikan:

- 1) Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 2) Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 3) Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal

No	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target
1	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional	Mendukung tercapainya tujuan Kementerian Perindustrian melalui pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Nilai RB area penguatan pengawasan Kementerian Perindustrian	Nilai RB khusus untuk area penguatan pengawasan berdasarkan hasil PMPRB	Persentase	71%
			Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Indeks penerapan MRI Kementerian Perindustrian	Level	3
			Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Terwujudnya level IACM Kementerian Perindustrian melalui <i>self assessment</i> atau penilaian dari BPKP	Level	3

B. Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal

Dalam mewujudkan tujuan Inspektorat Jenderal, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Perspektif Pemangku Kepentingan dan Proses Bisnis Internal yang diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
PERSPEKIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1.1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,4 %	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <1,4% total anggaran Kementerian Perindustrian
		1.2 Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	8 %	Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 (satu) tahun
		1.3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85%	Jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem Dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas
		1.4 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	91,5%	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	2.1 Nilai RB area penguatan pengawasan	71%	Nilai pada area penguatan pengawasan dibandingkan total nilai dalam penilaian Reformasi Birokrasi
		2.2 Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	Hasil penilaian Indeks Manajemen Risiko berdasarkan <i>Quality Assurance</i> BPKP terhadap Kementerian Perindustrian
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	3.1 Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner,Capaian masing-masing Inspektorat diambil berdasarkan nilai unit kerja yang menjadi cakupan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
		3.2Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM	Hasil penilaian Level IACM oleh BPKP terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian

C. Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian", dengan kegiatan pada Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3 Program Inspektorat Jenderal

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET
1	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	<ul style="list-style-type: none"> - Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I - Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I - Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I - Consulting Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I - Anggaran Satuan Kerja Inspektorat I - Evaluasi Kegiatan Inspektorat I 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 Laporan - 121 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan
2	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	<ul style="list-style-type: none"> - Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I - Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I - Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I - Consulting Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 Laporan - 13 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET
		- Anggaran Satuan Kerja Inspektorat I - Evaluasi Kegiatan Inspektorat I	- 1 Laporan - 5 Laporan
3	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	- Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III - Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III - Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III - Consulting Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satker Cakupan Tugas Inspektorat III - Anggaran Satuan Kerja Inspektorat III - Evaluasi Kegiatan Inspektorat III	- 3 Laporan - 109 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan - 5 Laporan
4	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	- Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV - Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV - Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV - Consulting Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV - Anggaran Satuan Kerja Inspektorat IV - Evaluasi Kegiatan Inspektorat IV	- 5 Laporan - 17 Laporan - 1 laporan - 1 laporan - 5 Laporan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET
5	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Perkantoran - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal - Layanan Sarana Internal - Layanan Pengawasan Internal - Layanan Monitoring & Evaluasi Internal - Bantuan Produk 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Layanan - 1 Layanan -1 unit -2 laporan -13 Laporan -200 Paket

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian dapat tercapai targetnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang selama Tahun 2021 dianggarkan dengan pagu total sebesar Rp 39,643,630,000.

D. Rencana Aksi

Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan tersebut dirinci dalam rencana aksi setiap triwulan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4 Rencana Aksi dan Realisasi Kegiatan Inspektorat Jenderal Triwulan I Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TRIWULAN I		Penanggung Jawab
			Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan	
Perspektif Pemangku Kepentingan					
1. Terwujudnya Efektivitas, dan Efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,4%	IR I: <ul style="list-style-type: none">• Koordinasi dan Pelaksanaan Reviu• Pelaksanaan Reviu Pengendalian atas Pelaporan Keuangan (LK-BMN)• Koordinasi dan Pelaksanaan Reviu RKBMN• Pelaksanaan Reviu Pengendalian Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)• Koordinasi Audit Program Pengembangan SDM Industri• Pelaksanaan Audit Kinerja Program Pengembangan SDM Industri• Koordinasi Pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi dan pembinaan pengawasan kinerja• Pelaksanaan Pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi (Pekerjaan Konstruksi Gedung Pendidikan, Mesin/Peralatan	IR I: <ul style="list-style-type: none">✓ Menunggu hasil pemeriksaan dari BPK-RI. Hasil indikator kinerja ini diharapkan dapat dilihat pada Triwulan II IR II: <ul style="list-style-type: none">✓ Persiapan pelaksanaan Monev WUB Ditjen IKMA✓ Reviu RKAKL✓ Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring Penyelesaian Hibah BMN di Ditjen ILMATE & IKMA✓ Pelaksanaan Pemetaan BMN dan penyelesaian hibah BMN di Ditjen ILMATE dan IKMA✓ Reviu LK dan BMN Satker Inspektorat II✓ Pengawasan Triwulanan Kegiatan Prioritas Ditjen ILMATE & IKMA	IR I, IR II, IR III, IR IV

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2021	TRIWULAN I		Penanggung Jawab
					Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan	
					Pendidikan dan Pembinaan Tenaga Kerja/Tenaga Pendidik) • Pelaksanaan pembinaan Pengawasan Kinerja oleh pimpinan • Koordinasi dan Pelaksanaan Reviu RKAKL IR II: • Audit Kinerja pada Program Penumbuhan dan Pengembangan Ditjen ILMATE • Audit Pengembangan dan Penumbuhan IKMA dan BPIPI Sidoarjo • Audit BMDTP Ditjen ILMATE dan Ditjen IKMA Pelaksanaan Evaluasi dan monitoring ke Dinas Provinsi Penerima Dana Dekonsentrasi • Persiapan Pelaksanaan Monev Program Penumbuhan Wirausaha Baru (WUB) Ditjen IKMA Pengawalan • Triwulan Kegiatan Prioritas Dirjen ILMATE dan Ditjen IKMA • Reviu PIPK • Reviu Perencanaan Anggaran (RKAKL)	IR III: ✓ Kegiatan Layanan audit Internal telah dilaksanakan pada satker Cakupan Tugas Inspektorat III ✓ Kegiatan TA 2020 telah dilaksanakan pada seluruh satker cakupan tugas (35 unit eselon II dan III). ✓ Kegiatan Reviu RKAKL (Revisi Anggaran) telah dilaksanakan sebanyak 2 kali terhadap satker cakupan tugas Inspektorat III. IR IV: ✓ Audit Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro TA 2020 ✓ pengawalan program kerja Pusat P3DN ✓ penyusunan SOP program kerja pusat P3DN ✓ pengawalan dan pendampingan kegiatan Hannover Messe	

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2021	TRIWULAN I		Penanggung Jawab
					Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan	
					<ul style="list-style-type: none"> • Monev SAKIP Satker Cakupan Inspektorat II • Koordinasi Pemetaan BMN yang Belum Dihilangkan di Ditjen ILMATE dan IKMA • Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring Penyelesaian Hibah BMN di Ditjen ILMATE dan IKMA • Reviu Laporan Keuangan dan BMN satuan Kerja Inspektorat II <p>IR III:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Reviu Laporan Keuangan dan BMN • Reviu Laporan Keuangan dan BMN • Reviu PIPK Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III • Pelaksanaan Reviu RK-BMN • Audit Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian • Audit Program SIINAS (Satker Pusdatin) • Audit Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri • Koordinasi Penyusunan Reviu RKA-KL • Pelaksanaan Pengawasan Kinerja 		

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2021	TRIWULAN I		Penanggung Jawab
					Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan	
					<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan, Pembinaan Pengawasan Kinerja dan Consulting Manajemen Risiko Cakupan Tugas Inspektorat III <p>IR IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan Program Ketahanan Pengembangan Perwilayahan Industri & Akses Industri Internasional (KPAII) • Pengawasan Program P3DN • Pengawasan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro • Pengawasan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil • Reviu Perencanaan Anggaran • Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV • Reviu Rencana Kebutuhan BMN Cakupan Tugas Inspektorat IV • Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi 		

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2021	TRIWULAN I		Penanggung Jawab
					Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan	
		2.	Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	8%	IR I: <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan Pelaksanaan Pendampingan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit IR II & IV: - IR III: <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas 	Pelaksanaan akan dilakukan pada Triwulan IV	IR I, IR II, IR III, IR IV
		3.	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85%	IR I: <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas IR II: <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya IR III: <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Pelaksanaan Audit dengan Tujuan Tertentu Audit dengan tujuan tertentu 	IR I & III: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sampai dengan akhir Maret, belum ada pengaduan berkadar pengawasan IR II, IR IV, & Ses: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Hasil pengaduan berdasarkan laporan Klinik dan belum ada pengaduan hingga akhir Maret 	IR I, IR II, IR III, IR IV, Ses ITJEN

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2021	TRIWULAN I		Penanggung Jawab
					Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan	
					<p>IR IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan dengan Tujuan Tertentu <p>Ses:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan Pengawasan aspek kepegawaian dan hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian • Koordinasi pelaksanaan klinik konsultasi pengawasan 		

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2021	TRIWULAN I		Penanggung Jawab
					Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan	
		4.	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	91.5%	IR I: <ul style="list-style-type: none"> •Koordinasi dan Pelaksanaan Monev Diklat Sistem 3 in 1 •Koordinasi dan Pelaksanaan Penilaian Implementasi SAKIP IR II: <ul style="list-style-type: none"> •Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Ditjen ILMATE dan IKMA IR III: <ul style="list-style-type: none"> ○ Koordinasi Monitoring & Evaluasi SAKIP ○ Monev Kapabilitas Balai Besar dan Baristand dalam mendukung Industri 4.0 (Prioritas dalam bidang tekstil) ○ Rapat Koordinasi Monev Kapabilitas Balai Besar dan Baristand dalam mendukung Industri 4.0 ○ Penyusunan Kuesioner Monev Kapabilitas Balai Besar dan Baristand dalam mendukung Industri 4.0 IR IV: Koordinasi Monev SAKIP Cakupan Tugas Inspektorat IV	IR I, II, III, IV: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pelaksanaan direncanakan pada Triwulan III 	IR I, IR II, IR III, IR IV

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2021	TRIWULAN I		Penanggung Jawab
					Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan	
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1.	Nilai RB area penguatan pengawasan	71%	<ul style="list-style-type: none">Forum Koordinasi PMPRBPelaksanaan Pemenuhan Aksi pencegahan korupsi di Lingkungan Kementerian Perindustrian	Kegiatan Masih berupa persiapan	Ses Itjen
		2.	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	Berdasarkan kegiatan tahun lalu, kegiatan berupa pengisian kuesioner seperti survey kepuasan pelayanan Inspektorat Jenderal yang disebarkan keseluruh satker cakupan tugas.	Pelaksanaan akan dilakukan pada Triwulan III	IR I, IR II, IR III, IR IV, Ses Itjen
Perspektif Proses Bisnis Internal							
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1.	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	IR I: <ul style="list-style-type: none">Pembahasan Rencana Aksi Hasil Evaluasi LainnyaKoordinasi dan Penyusunan LAKIPKoordinasi Peran Pengawasan Lainnya IR II:	IR I, IR II, IR III, IR IV: Pelaksanaan pengawasan telah sesuai standar seperti reviu, audit, kegiatan consulting, saat ini capaian masih 20% Ses: <ul style="list-style-type: none">✓ Monev dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP	IR I, IR II, IR III, IR IV, Ses Itjen

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2021	TRIWULAN I		Penanggung Jawab
					Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan	
					<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Progrsm Kerja dan Anggaran Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas <p>IR III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Peran Pengawasan Lainnya Cakupan Tugas Inspektorat III <p>IR IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Dokumen Evaluasi & Akuntabilitas Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya <p>Ses:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Penelaahan Sejawat 	AP), belum semua IR melakukan pengisian survey	
		2.	Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja 	✓ Telah dilaksanakan penyusunan dan reuiu LAKIP Itjen dan Set Itjen Tahun 2020	✓ Ses Itjen

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2021	TRIWULAN I		Penanggung Jawab
					Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan	
					<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan Reviu LAKIP ITJEN dan SET ITJEN • Reviu Perkin dan Renstra • Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah dilaksanakan penyusunan perjanjian kinerja ✓ Telah dilaksanakan pra evaluasi SAKIP unit eselon II di lingkungan Itjen dan saat ini masih berlangsung penilaian Sakip Eselon I 	

E. Informasi Kinerja dan Realisasi Inspektorat Jenderal Tahun 2021

Telah di susun Informasi Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2021, yang menggambarkan sasaran, indikator kinerja, target dan kegiatan, dengan realisasi triwulan I sebagai berikut :

Tabel 5. Informasi Kinerja Berdasarkan Perkin Inspektorat Jenderal Tahun 2020

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2021	RENCANA KEGIATAN
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN					
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	<1,4%	-masih dalam proses pelaksanaan BPK belum selesai melakukan pemeriksaan	INSPEKTORAT I <ul style="list-style-type: none"> ▪ Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL ▪ Monitoring dan Evaluasi SAKIP satuan kerja cakupan tugas Insektorat I ▪ Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Kepemerintahan sesuai Kebijakan Pengawasan ▪ Koordinasi pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi dan Pembinaan Pengawasan Kinerja ▪ Pelaksanaan pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi (Pekerjaan Konstruksi Gedung Pendidikan, Mesin/Peralatan

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2021	RENCANA KEGIATAN
					<p>Pendidikan dan pembinaan tenaga kerja/tenaga pendidik</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan pembinaan pengawasan kinerja oleh pimpinan ▪ Reviu LK dan BMN satker Cakupan Tugas Inspektorat I ▪ Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Cakupan Tugas Inspektorat I <p>INSPEKTORAT II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL - Monev SAKIP satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Kepemerintahan sesuai Kebijakan Pengawasan (Monev WUB dan Monev DAK) - Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi - Pengawasan penyelesaian hibah BMN

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2021	RENCANA KEGIATAN
					<ul style="list-style-type: none"> - Reviu Laporan Keuangan dan BMN satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II - Reviu pengendalian Intern atas pelaporan keuangan INSPEKTORAT III <ul style="list-style-type: none"> - Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL - Monev SAKIP satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Kepemerintahan sesuai Kebijakan Pengawasan - Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi - Pengawasan penyelesaian hibah BMN - Reviu Laporan Keuangan dan BMN satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III - Reviu pengendalian Intern atas pelaporan keuangan - Reviu RKBMN INSPEKTORAT IV

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2021	RENCANA KEGIATAN
					<ul style="list-style-type: none"> - Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL - Monev SAKIP satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Kepemerintahan sesuai Kebijakan Pengawasan - Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi - Reviu Laporan Keuangan dan BMN satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV - Reviu pengendalian Intern atas pelaporan keuangan - Reviu RKBMN
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	8%	Pelaksanaan direncanakan pada Triwulan III	INSPEKTORAT I, II, III, IV <ul style="list-style-type: none"> - Audit Kinerja - Audit Khusus - Reviu RKAKL
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	85%	Telah dilaksanakan pelayanan klinik konsultasi Itjen TW I, namun belum ada pengaduan hingga akhir Maret 2021 ini	IR I, II, III, IV Pengawasan sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat SEKRETARIAT ITJEN

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2021	RENCANA KEGIATAN
					<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Koordinasi pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja *)IKU	91.5%	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat pembahasan tindak lanjut -pemeriksaan BPK atas PDDT Sei Mangkei - Follow Up permintaan dokumen pemeriksaan BPK - Pelaksanaan Revaluasi BMN sampai tindak lanjutnya - Koordinasi ke DJKN - tindak lanjut saldo dekon dan pmutakhirannya - Pembahasan tindak lanjut audit kinerja BPK - Rapat koordinasi pemeriksaan BPK atas LK satker BLU(memastikan KAP menyeledaikan pemeriksaan pada satker BLU sebelum waktu yang telah ditentukan BPK 	<p>SES INSPEKTORAT JENDERAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam rangka Pemutakhiran data tindak lanjut - Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut; - Temu Teknis penyuluhan/pemutakhiran data tindak lanjut; - Tindak Lanjut hasil monitoring evaluasi dan reviu Inspektorat Jenderal; - Rapat Koordinasi Pengawasan <p>INSPEKTORAT I, II, III, IV: Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan</p>

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2021	RENCANA KEGIATAN
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai RB area penguatan pengawasan	71%	Rapat persiapan pelaksanaan PMPRB dan pembentukan tim asesori (pelaksanaan kegiatan kirim surat dan koordinasi melalui aplikasi WAhatsapp)	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL <ul style="list-style-type: none"> - Forum Koordinasi penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian (PMPRB) - Penilaian mandiri satuan kerja Zona Integritas dalam rangka mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Kementerian Perindustrian
		Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	Belum dilaksanakan dan direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan III	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL <ul style="list-style-type: none"> - Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemenperin; - Pemetaan tingkat maturitas SPIP di lingkungan Inspektorat Jenderal; - Implementasi SPIP di lingkungan Inspektorat Jenderal INSPEKTORAT I, II, III, IV: <ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi Penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I, II, III, IV

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2021	RENCANA KEGIATAN
Internal Process Perspective					
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	Belum dilaksanakan dan direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan III	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal INSPEKTORAT I, II, III, IV: <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Program Kerja dan Anggaran - Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas - Koordinasi peran pengawasan lainnya cakupan tugas Inspektorat I, II, III, IV
		Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilaksanakan penyusunan dan reuiu LAKIP Itjen dan Set Itjen Tahun 2020 - Telah dilaksanakan penyusunan perjanjian kinerja <p>Telah dilaksanakan pra evaluasi SAKIP unit eselon II di lingkungan Itjen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan <i>Self-Assessment</i> melalui Aplikasi yang dibentuk oleh BPKP untuk penilaian IACM Level 3 .

BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

III.1. Analisa Hasil Capaian dan Anggaran

Pada Triwulan I Tahun 2021 Inspektorat Jenderal telah melakukan revisi anggaran sebanyak dua (2) kali. Pagu awal sebesar Rp 40.643.630.000. Revisi pertama dilakukan tanggal 16 Februari 2021 dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan S-30/MK.02/2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021 dengan tema revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah. Revisi kedua dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2021 sesuai dengan Surat Inspektorat Jenderal Nomor 98/IJ-IND/II/2021 perihal usulan revisi anggaran dalam rangka pelaksanaan PPKM Mikro di desa/kelurahan maka Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) menugaskan Kementerian Perindustrian agar menyediakan bantuan masker kepada masyarakat senilai Rp 600,000,000, -. Berdasarkan surat Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor B/269/SJ.IND/KU/III/2021 tentang usulan revisi anggaran, pada bulan Maret Tahun 2021 Sekretariat Inspektorat Jenderal melakukan penambahan KRO, RO, dan Komponen baru pada program dukungan manajemen terkait kegiatan pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang pengawasan internal pada Inspektorat Jenderal.

Kegiatan Inspektorat Jenderal pada triwulan I ini telah terlaksana dengan cukup baik, sebagai informasi, komposisi pegawai Inspektorat Jenderal yang *work from office* juga telah meningkat dengan sudah terlaksananya vaksinasi Covid-19. Namun, kondisi pandemi Covid-19 masih belum baik dan perlu adanya protokol kesehatan yang ketat bagi pejabat dan pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang *work from office* (WFO).

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian pada Triwulan I Tahun 2021 (Januari - Maret) mencapai Rp. 4,723,590,306,- atau 11.92 % dari total pagu anggaran sebesar Rp.39.643.630.000,-.

Tabel berikut menggambarkan pagu anggaran dan realisasinya sampai dengan TW I tahun 2021 :

Tabel 6. Realisasi Keuangan Inspektorat Jenderal Triwulan I Tahun 2021

Jenis Kegiatan	PAGU Anggaran (Rp.)	Realisasi Triwulan I		Realisasi s.d. Triwulan I		Sisa Anggaran s.d. Triwulan I	
		Keuangan (Rp.)	%	Keuangan (Rp.)	%	J u m l a h (Rp.)	%
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	1,880,000,000	326,589,972	17.37	326,589,972	17.37	1,553,410,028	82.62
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	1,880,000,000	121,856,302	6.48	121,856,302	6.48	1,758,143,698	93.51
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	1,880,000,000	151,403,713	8.05	151,403,713	8.05	1,728,596,287	91.94
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	1,880,000,000	119,506,703	6.36	119,506,703	6.36	1,760,493,297	93.64
Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	32,123,630,000	4,004,233,616	12.47	4,004,233,616	12.47	28,119,396,384	87.53
TOTAL	39,643,630,000	4,723,590,306	11.92	4,723,590,306	11.92	34,920,039,694	88.08

Adapun realisasi anggaran per jenis belanja dilaporkan sebagai berikut:

Tabel 7 Realisasi Anggaran Berdasarkan data SPAN 31 Maret 2021

No	Kode Nama Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%	Dana Tersedia
1	51 Belanja Pegawai	19,779,464,000	2,942,337,350	14.88	16,837,126,650
2	52 Belanja Barang	19,274,166,000	1,781,252,956	9.24	17,492,913,044
3	53 Belanja Modal	590,000,000	0	0.00	590,000,000
Jumlah		39,643,630,000	4,723,590,306	11.92	34,920,039,694
<i>Disclaimer: Realisasi berbasis aktual dan bersifat Bruto</i>					

III.2. Kegiatan Inspektorat Jenderal

Capaian kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021 diperoleh melalui pencapaian pelaksanaan kegiatan Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal yang didukung sepenuhnya oleh anggaran yang telah ditetapkan setelah revisi kedua, yaitu Rp 39,643,630,000,-.

Dengan adanya *New Normal*, kegiatan Inspektorat Jenderal yang dapat terlaksana pada Triwulan I (Januari-Maret) yaitu:

1. Kegiatan Pengawasan selama Triwulan I Tahun 2021

a. Inspektorat I:

- Reviu PIPK TA 2020 pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal (18 Januari – 5 Februari 2021);
- Reviu LK/BMN Semester II TA 2020 pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal (18 Januari – 19 Februari 2021);
- Uji Sampling data Reviu LK/BMN pada Politeknik STTT Bandung (20-22 Januari 2021)
- Uji Sampling data Reviu LK/BMN pada Politeknik AKA Bogor & SMAK Bogor (20-22 Januari 2021)
- Reviu Usulan Revisi Anggaran BPSDMI (13 Januari-15 Januari 2021)
- Koordinasi Pengawasan dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Audit Pembangunan Gedung PIDI 4.0 ke B4T Bandung
- Uji Sampling data Reviu LK/BMN pada Poltek IFPK Kendal dan BDI Yogyakarta (2 Februari – 5 Februari 2021);
- Uji Sampling data reviu LK/BMN pda Poltek ATK Yogyakarta (2 Februari – 5 Februari 2021);
- Mendampingi pimpinan dalam rangka kunjungan kerja ke Politeknik Industri Petrokimia, Cilegon (2 Februari - 4 Februari 2021);
- Koordinasi pengawasan kegiatan beresiko tinggi pada Pooliteknik Industri Kimia Cilegon (8 Februari – 10 Februari 2021);
- Reviu Revisi anggaran dalam rangka refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal (8 Februari – 10 Februari 2021);

- Reviu data/dokumen struktur dan anggaran dalam rangka rencana audit pekerjaan struktur gedung PIDI (15 Februari – 17 Februari 2021);
- Audit pekerjaan struktur gedung PIDI 4.0 Permata Hijau (18 Januari – 5 Februari 2021);
- Pendampingan reviu dokumen mutu pekerjaan struktur gedung PIDI 4.0 Permata Hijau (22 Februari 26 Februari 2021);
- Reviu Pelaksanaan Diklat 3 in 1 di Yogyakarta, Boyolali, Sukoharjo, Kaltan dan Madiun (21 Februari – 24 Februari 2021);
- Pendampingan/ pemantauan pelaksanaan diklat 3 in 1 di Brebes dan Tegal (22 Februari - 25 Februari 2021);
- Reviu pelaksanaan diklat 3 in 1 di Brebes dan Banyumas (22 Februari – 25 Februari 2021);
- Pendampingan/ pemantauan pelaksanaan diklat 3 in 1 Bandung (22 Februari – 25 Februari 2021);
- Reviu LK/BMN Kementerian Perindustrian TA 2020 (17 Februari – 19 Februari 2021).
- Reviu revisi anggaran pengadaan bantuan masker pada BPSDMI (1-3 Maret 2021);
- Audit pekerjaan struktur gedung PIDI 4.0 Permata Hijau tanggal 1-5 Maret 2021;
- Pendampingan reviu dokumen mutu pekerjaan strukturgedung PIDI 4.0 permata hijau (pegawai B4T) tanggal 1-5 Maret 2021;
- Evaluasi pelaksanaan Diklat 3 in 1 periode Januari- Februari 2021 pada BDI Jakarta tanggal 8-10 Maret 2021;
- Pengawasan pelaksanaan Hibah BMN di Banten tanggal 8-10 Maret 2021;
- Mendampingi pimpinan dalam rangka pengawasan pelaksanaan hibah BMN di Banten tanggal 8-10 Maret 2021;
- Koordinasi pengawasan pekerjaan gedung PIDI di B4T Bandung tanggal 15-17

Maret 2021;

- Evaluasi pelaksanaan diklat 3 in 1 periode Januari – Februari 2021 pada BDI Surabaya tanggal 15-17 Maret 2021;
- Pengawasan pelaksanaan Hibah BMN di Jawa Timur tanggal 16-19 Maret 2021;
- Pengawasan pelaksanaan Hibah BMN di Yogyakarta dan Jawa Tengah tanggal 17 – 20 Maret 2021;
- Pengawasan pelaksanaan Hibah BMN di Jawa Barat tanggal 24-26 Maret 2021;
- Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Hibah BMN di Jawa Barat tanggal 24-26 Maret 2021;
- Mendampingi pimpinan dalam rangka Pembinaan Pengawasan pelaksanaan Hibah BMN di Jawa Barat tanggal 24-26 Maret 2021;
- Koordinasi pengawalan pekerjaan konstruksi pada Politeknik APP Jakarta tanggal 24-26 Maret 2021;
- Evaluasi dan penilaian SAKIP di lingkungan BPSDMI dan Sekretariat Jenderal tanggal 22 Maret – 23 April 2021;
- Pengawasan Hibah BMN di APP di Jakarta tanggal 30 Maret – 1 April 2021;
- Melakukan Reviu buka blokir anggaran BPSDMI tanggal 23-25 Maret 2021;
- Melakukan audit kinerja dan keuangan pada Sekretariat Jenderal TA 2021 tanggal 1 Feb - 12 Maret 2021;
- Reviu pengadaan Barang/Jasa TA 2021 pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal tanggal 22 – 30 Maret 2021.

b. Inspektorat II:

- Menyusun Laporan Kinerja Inspektorat II tahun 2020;
- Menginput Monev Smart DJA, ALKI, Monev Tapkin, Bappenas;
- Revisi Program Kerja Pengawasan tahunan PKPT Inspektorat II Th 2021;
- Menyusun Rencana Kerja dan anggaran IR II tahun 2021;

- Menghadiri undangan Pre Entry Meeting Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan tahun 2020;
- Reviu Revisi *Refocusing* dan Realokasi;
- Bimbingan teknis Penyusunan SKP;
- Menghadiri Undangan Rapat Pengkajian Usulan AMMDES;
- Reviu Pelaksanaan Hibah BMN pada Direktorat Jendral Industri Kecil;
- Mengkoordinasi pelaksanaan audit tematik pada Dirjen Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Elektronika;
- Reviu revisi DIPA *Refocusing* dan Realokasi Belanja Dirjen Industri Kecil;
- Melakukan audit tematik pada Dirjen Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Elektronika;
- Mengkoordinasi Pelaksanaan Reviu LKBMN BPIPI Sidoarjo;
- Menghadiri rapat monitoring dan evaluasi Progress Hibah dan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat;
- Reviu PIPK BPIPI Sidoarjo;
- Reviu LKBMN BPIPI Sidoarjo;
- Menghadiri rapat pengkajian usulan AMMDES untuk katalog Elektronik;
- Melakukan Reviu buka blokir Anggaran Ditjen IKMA TA 2021;
- Reviu PIPK DAN LKBMN Ditjen IKMA;
- Reviu PIPK dan LKBMN Ditjen ILMATE;
- *Kick off Pelaksanaan Anggaran 2021 dan Webinar” Tantangan dan Penguatan Strategi Pelaksanaan Anggaran dalam Era Pandemi Covid” (3 Februari 2021);*
- Undangan Rapat Koordinasi Progress Penyelesaian Hibah pada Ditjen IKMA (3 Februari 2021);
- Narasumber Sosialisasi Juknis Pertanggung jawaban Keuangan (9 Februari 2021);
- Rapat Tindak lanjut Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (9 Februari 2021);
- Melakukan cek Mesin Peralatan dalam Rangka Audit Ditjen ILMATE di Bandung

Techno Park (18 Februari – 20 Februari 2021);

- Melakukan Cek Mesin Peralatan dalam rangka Audit Ditjen ILMATE (15 Februari s.d. 17 Februari 2021);
- Melakukan Cek Mesin Dalam Rangka Audit Ditjen ILMATE di UGM (15 Februari s.d. 17 Februari 2021);
- Melakukan Cek Mesin Audit ILMATE di Bandung *Techno Park* (18 Februari – 20 Februari 2021);
- Pemantauan Rencana Aksi Peningkatan Kapabilitas APIP dan Koordinasi Pengawasan Intern Tahun 2021 Kemenperin (18 Februari 2021);
- Undangan Rapat Koordinasi Penyelesaian Hibah dan PMPP (23 Februari 2021);
- Verifikasi BMN pada Direktorat Jenderal IKMA (4 Februari – 28 Februari 2021);
- Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran terkait Realokasi Anggaran dalam Penanganan dampak Covid 19 bagi Pegawai di Direktorat Jenderal ILMATE dan Realokasi Anggaran guna pengadaan masker bagi masyarakat (24 Februari 2021);
- Penelitian dan Reviu Usulan Revisi Anggaran dalam hal Realokasi Anggaran Direktorat Jenderal ILMATE TA 2021 (25 Februari – 2 Maret 2021).
- Verifikasi penyelesaian hibah BMN pada Direktorat Jenderal IKMA tanggal 1 Maret 2021;
- Reviu Revisi DIPA realokasi bantuan masker ke masyarakat pada Dirjen IKMA tanggal 1 Maret 2021;
- Menyusun laporan evaluasi kegiatan Inspektorat II bulan Februari tanggal 1 Maret 2021;
- Evaluasi SAKIP Unit Eselon II Dirjen ILMATE tanggal 1 Maret 2021;
- Menghadiri perumusan peraturan Dirjen ILMATE tentang Tata Cara revisi anggaran pada kuasa pengguna anggaran tanggal 2 Maret 2021;
- Menghadiri rapat Tindak Lanjut kemajuan hibah BMN dan PMPP Ditjen ILMATE tanggal 3 Maret 2021;

- Menghadiri undangan penelaahan usulan daftar barang atau bahan untuk sektor industri yang tercantum dalam PMK 12/2020 dan PMK 134/2020 dan diusulkan mendapatkan fasilitas BMDTP 2021 tanggal 5 Maret 2021;
- Menghadiri undangan rapat penyelesaian penyertaan modal pemerintah pusat di PT Perkebunan Nusantara tanggal 9 Maret 2021;
- Pengawasan penyelesaian hibah BMN pada kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Jember tanggal 10 Maret 2021;
- Pengawasan penyelesaian hibah BMN pada kabupaten Madiun dan kabupaten Magetan 10 Maret 2021;
- Pengawasan penyelesaian hibah BMN pada Kabupaten Garut tanggal 10 Maret 2021;
- Melakukan audit program TA 2020 pada BPIPI Sidoarjo Jatim tanggal 10 Maret 2021;
- Undangan Kegiatan Evaluasi pelaksanaan anggaran Kementerian Perindustrian Bulan Maret 2021;
- Pelaksanaan sosialisasi reviu pengadaan barang dan jasa oleh APIP TW I TA 2021 tanggal 16 Maret 2021;
- Mendampingi pimpinan menghadiri acara serah terima alih status alat pengujian masker N95 tanggal 16 Maret 2021;
- Menghadiri evaluasi pelaksanaan USDFS tanggal 16 Maret 2021;
- Menghadiri rapat pembahasan awal DAK Fisik dan Non Fisik Tahun 2022.

c. Inspektorat III:

- Kegiatan Lanjutan Audit BPPI Pusat TA 2020;
- Survey Pendahuluan Audit Inspektorat Jenderal;
- Reviu PIPK dan LKBMN pada satker Baristand Aceh, Baristand Bandar Lampung, Baristand manado, Baristand Samarinda, Baristand Pontianak, Baristand Ambon, BBIHP Makasar, Baristand Banjarbaru, Baristand Medan, BPPSI Pekanbaru;

- Reviu Revisi anggaran TA 2021 pada BPPI, Pusdatin, dan Itjen.
- Reviu Revisi anggaran dalam rangka pemotongan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19 pada BPPI (beserta unit vertikalnya), Itjen dan Pusdatin;
- Reviu LK/BMN tahunan ta 2020 pada satker BBK, BBPK, BBLM, BBBT, BBIA, Baristand Palembang, BBKK, BSI, Baristand Padang, BBTPI Semarang, Baristand Surabaya, BBKKP Yogyakarta, BBKB Yogyakarta;
- Reviu revisi anggaran dalam rangka pengadaan bantuan masker untuk masyarakat pada BPPI (beserta unit vertikalnya), Itjen dan Pusdatin.
- Penilaian Monev SAKIP Eselon II pada BPPI, Inspektorat Jenderal dan Pusdatin;
- Audit Kinerja BBPK, BBLM, BBBT, BBKKP, BBKB dan BBTPPI;
- Reviu PAPBJ satker cakupan tugas IR III.

d. Inspektorat IV:

- Pendampingan bantuan mesin pada Ditjen IKFT;
- Revisi RKBMN Ditjen IKFT 2021;
- Revisi anggaran Ditjen IKFT 2021;
- TM Hannover Messe 2021;
- Revisi Anggaran P3DN 2021;
- Monev Progress hibah PMPP
- Pendampingan penyelesaian Tindak Lanjut hasil pengawasan Ditjen IKFT TA 2018 (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)
- Reviu revisi realokasi anggaran TA 2021 (Ditjen IA, Ditjen IKFT, Ditjen KPAIL dan Pusat P3DN);
- Reviu laporan keuangan belanja subsidi (BA.BUN) Kementerian Perindustrian TA 2020 ;
- Audit PSN dan kawasan industri Ditjen KPAIL TA 2020;
- Audit beresiko tinggi Ditjen IKFT TA 2020:

- Restrukturisasi mesin dan peralatan industri tekstil kulit dan alas kaki;
 - Fasilitas Investor dalam rangka penumbuhan dan pengembangan industri petrokimia Teluk Bintuni.
- Penyelesaian hibah BMN Ditjen IKFT dan KPAIL (Kab Cirebon, Kab 50 kota, Kabupaten Siantar dan Kab Binjai);
- Pendampingan keikutsertaan Indonesia sebagai partner country Hannover Messe 2021;
- Penyusunan program dan RKA Inspektorat IV TA 2022;
- Rapat-rapat koordinasi lainnya baik internal maupun melibatkan eksternal.
- Melaksanakan penyelesaian hibah BMN Direktorat Jenderal IKFT di Demak pada tanggal 3-5 Maret 2021;
- Melaksanakan penyelesaian hibah BMN Direktorat Jenderal IKFT di Banjarmasin pada tanggal 3-5 Maret 2021;
- Rapat koordinasi dan kunjungan lapangan ke PT. Asahimas Chemical dan PT. Cheetam Garam Indonesia pada tanggal 9 Maret 2021;
- Evaluasi SAKIP Eselon II;
- Penyelesaian BMN Ditjen IKFT dan KPAIL;
- Reviu PAPBJ 2020;
- Pendampingan penyusunan Sekretariat, SOP dan program kerja Pokja Pemantauan P3DN 2021 pada tanggal 10 Maret 2021;
- Pendampingan persiapan pelaksanaan Hannouver Messe 2021 pada tanggal 12 Maret 2021;
- Melaksanakan penyelesaian hibah BMN Direktorat Jenderal IKFT di Padang pada tanggal 17-19 Maret 2021;
- Melaksanakan penyelesaian hibah BMN Direktorat Jenderal IKFT di Simalungun pada tanggal 17-19 Maret 2021;

- Melaksanakan penyelesaian hibah BMN Direktorat Jenderal IKFT di Kepulauan Riau pada tanggal 17-19 Maret 2021;
- Melaksanakan penyelesaian hibah BMN Direktorat Jenderal IKFT di kabupaten Langkat pada tanggal 24-26 Maret 2021;
- Melaksanakan koordinasi dan kunjungan ke Kawasan Berikat Nusantara dan Jakarta Industrial Estate pada tanggal 25 Maret 2021;
- Melaksanakan penyelesaian hibah BMN Direktorat Jenderal IKFT di Kota Depok pada tanggal 31 Maret 2021.

2. Penyusunan Angka Dasar Tahun 2022

Permintaan data persiapan Reviu Angka Dasar dalam rangka penyusunan Pagu Indikatif TA 2022, didasarkan pada Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-18/AG/2021 tanggal 22 Januari 2021 dalam rangka persiapan Reviu Angka Dasar dan Penyusunan Pagu Indikatif 2022, Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemutakhiran angka dasar TA 2022 dan menyusun prakiraan maju TA 2023-2025 melalui Aplikasi SAKTI.
- 2) Mengisi capaian Kinerja melalui Aplikasi SMART sebagai berikut:
 - a. Kementerian/Lembaga Negara

Melakukan Entry Data Capaian Sasaran Strategis dan monitoring nilai Kinerja Unit Eselon I.
 - b. Unit Eselon I

Melakukan entry data capaian keluaran program dan capaian sasaran program serta mewajibkan Satker melakukan entry data realisasi volume keluaran dan realisasi indikator keluaran kegiatan Satker.
- 3) Menyampaikan data-data berikut ini:
 - a. Rencana PNBPN Tahun 2022 yang menjadi tugas dan kewenangan K/L selaku instansi pengelola PNBPN;
 - b. Data Anggaran kontrak tahun jamak Tahun 2021, 2022 s/d 2024;

- c. Data dan Alokasi Anggaran untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Perpres Nomor 109 Tahun 2020;
- d. Kegiatan Prioritas Nasional TA 2021 beserta alokasi anggarannya yang akan berlanjut pada Tahun 2022;
- e. Data jumlah Aparatur Sipil Negara 2020 dan rencana pengadaan TA 2021 dan TA 2022;
- f. Perkiraan kebutuhan belanja operasional dan non-operasional berkarakteristik operasional TA 2022;
- g. Kegiatan tahun 2022 yang dibiayai dengan sumber dana Non-RM (RMP, PLN, HLN, PNB, BLU, PHDN, dan SBSN);
- h. Usulan penyesuaian/perubahan Rumusan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dalam rangka penguatan/penyempurnaan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran TA 2022.

Pemutakhiran angka dasar TA 2022, pengisian Capaian Kinerja Anggaran TA 2020, dan data-data tersebut diatas akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan penyusunan reviu angka dasar dalam rangka penyusunan Pagu Indikatif TA 2022. Dalam rangka penyusunan anggaran tahun 2022, Sekretaris Inspektorat Jenderal telah mengoordinasikan penyusunan KAK/RAB dari masing-masing eselon II untuk diinput pada aplikasi *KR/SNA* Bappenas. Kemudian juga akan dilakukan pembahasan terkait rencana kegiatan Inspektorat Jenderal tahun 2022. Pada bulan Maret dilakukan perbaikan Rencana Kinerja Tahun anggaran 2022.

3. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Kegiatan yang berkaitan dengan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Triwulan I Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun Laporan Pemantauan Tindak Lanjut BPK-RI Semester II Tahun 2020, Laporan Telah Disusun Sesuai Dokumen Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang telah ditindaklanjuti;
- 2) Menyusun Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal Triwulan IV Tahun 2020, Laporan Telah Disusun Sesuai Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal yang telah disampaikan;
- 3) Koordinasi Dengan Auditor Pemeriksa untuk Verifikasi Kesesuaian Dokumen Tindak Lanjut dengan Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal, Telah

dilaksanakan koordinasi dan telah diverifikasi auditor dokumen dengan auditor pemeriksa;

- 4) Koordinasi dengan Unit Kerja Pusat maupun Vertikal untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI atas saldo temuan yang belum selesai ditindaklanjuti, Koordinasi dilakukan melalui surat resmi;
- 5) Menginventarisir data dan dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal, Telah dilakukan sesuai dengan dokumen tindak lanjut yang telah disampaikan kepada Inspektorat Jenderal;
- 6) Koordinasi dengan para Penanggung Jawab/Koordinator Kegiatan Inspektorat Jenderal Perihal Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2019, Koordinasi dilakukan melalui surat resmi dan secara tatap muka.
- 7) Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang bersifat administratif dengan seluruh Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian beserta Tim Pemantauan Tindak Lanjut BPK-RI tanggal 16 Februari 2021 ;
- 8) Rapat Pembahasan Pemeriksaan Laporan Keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum Kementerian Perindustrian oleh Pemeriksa Eksternal yaitu Perwakilan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tanggal 19 Februari 2021;
- 9) Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI di Lingkungan Sekretariat Jenderal tanggal 25 Februari 2021;
- 10) Koordinasi dengan Unit Kerja Pusat maupun Vertikal untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan internal atas saldo temuan yang belum selesai ditindaklanjuti, koordinasi dilakukan melalui surat resmi;
- 11) Menginventarisir data dan dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal, Telah dilakukan sesuai dengan dokumen tindak lanjut yang telah disampaikan kepada Inspektorat Jenderal;
- 12) Menginventarisir Data Tindak Lanjut Catatan Hasil Reviu Revaluasi BMN, Data telah diupdate dan dibuat laporan sementara berdasarkan dokumen tindak lanjut yang telah disampaikan ke Koordinasi dengan unit kerja pusat dan vertikal dalam rangka tindak lanjut atas saldo temuan hasil pemeriksaan BPK RI.

Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin, baik melalui media surat menyurat maupun melalui *virtual meeting*;

- 13) Koordinasi dengan unit kerja pusat dan vertikal dalam rangka penyelesaian tindak lanjut atas saldo temuan hasil pengawasan internal;
- 14) Rapat pembahasan pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum oleh Pemeriksa Eksternal yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP);
- 15) Rapat pembahasan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- 16) Rapat pembahasan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja atas Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Pangan, Industri Farmasi serta Industri Kimia Dasar berbasis Migas dan Batubara tahun 2015 s/d semester I tahun 2018 pada Kementerian Perindustrian;
- 17) Verifikasi dan menginventarisasi dokumen tindak lanjut hasil pengawasan internal dan hasil pemeriksaan BPK RI;
- 18) Menyiapkan bahan paparan pimpinan dalam rangka persiapan penilaian Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dari sisi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal.

4. Dokumen-Dokumen Perencanaan Inspektorat Jenderal

Dokumen perencanaan yang telah diselesaikan pada triwulan I ini antara lain:

- a) Dokumen Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020
- b) Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021;
- c) Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2021.
- d) Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2021.

5. Laporan APIP Tahun 2020

Laporan APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Semester II tahun 2020 telah disampaikan ke Menteri Perindustrian dengan tembusan ke

KeMENPAN&RB sesuai surat Inspektur Jenderal Nomor 123/IJ-IND/III/2021 tanggal 31 Maret 2021.

6. Kegiatan Evaluasi Hasil Pengawasan

Kegiatan Evaluasi Hasil Pengawasan yang dilaksanakan selama Triwulan I (Januari-Maret 2021) adalah sebagai berikut:

Laporan APIP Semester II tahun 2020 yang diselesaikan di sampai akhir Maret 2021;

Penyusunan draft SK untuk tim penilai Zona Integritas Kementerian Perindustrian;

Data Tindak Lanjut.

7. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kegiatan Pengelolaan Kepegawaian dalam hal pengembangan SDM yang telah dilaksanakan selama Triwulan I (Januari-Maret 2021) adalah sebagai berikut :

- a. a. PKS Penyusunan SKP 2021;
- b. Mengajukan kenaikan jabatan auditor;
- c. Mengajukan kenaikan pangkat pegawai
- d. Mengkoordinir ujian *inpassing* perbendaharaan an. Ira Sukmawati dan Sutarno;
- e. Mengurus administrasi tunjangan fungsional penyetaraan Eselon 3 dan Eselon 4;
- f. Menyampaikan SK Pensiun an. Achmad Rodjih;
- g. Mengkoordinasi pengajuan DUPAK auditor ke tim penilai;
- h. Menyampaikan surat pemberitahuan penyampaian LHKPN kepada pegawai yang belum melaporkan LHKPN;
- i. Memproses penyesuaian kelas jabatan an Afrizal haris, Dyan Garnetta, M Adhi Rachmaidi ke Biro OSDM;
- j. Membuat pemberitahuan dokumen persiapan pensiun pegawai an. Azniyetti Aziz;
- k. Menyiapkan administrasi dan melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah an Rayersaad Saesar, Farha Maulida dan Fernando JVR;
- l. Melakukan pengisian pemetaan pengelolaan JFA oleh APIP K/L/D dari BPKP;

- m. Membuat undangan rapat PPNP terkait evaluasi dan penandatanganan kontrak;
- n. Melaporkan data pegawai penerima vaksin yang tidak dapat melakukan akses link penerima vaksin;
- o. Menghitung formasi analis keuangan APBN dan pranata keuangan APBN bersama sub bagian keuangan;
- p. Mengecek Draft Calon penerima Satya Lencana Karya Satya tahun 2021;
- q. Melaporkan data calon pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Itjen untuk menempati posisi organisasi yang baru;
- r. Membuat dokumen pelaksanaan penilaian angka kredit semester 2 tahun 2020;




8. Pengelolaan Keuangan






Kegiatan yang dilakukan dalam hal pengelolaan keuangan selama Triwulan I (Januari-Maret 2021) adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran gaji dan tunjangan yang rutin setiap bulan;
- b. Pelaporan capaian output ke KPPN;
- c. Koordinasi terkait rekonsiliasi keuangan.

Adapun progres capaian dari Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal pada Triwulan I diinformasikan pada tabel berikut :

Tabel 11. Progres Capaian Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal TW IV

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW I	Keterangan
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1.4%	Masih dalam proses pemeriksaan oleh BPK	
		2. Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	8 %	Masih dalam proses pelaksanaan	
		3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	85%	Belum ada pengaduan hingga akhir Maret	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW I	Keterangan
		4. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *IKU	91.5%	Masih dalam proses pelaksanaan	
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1. Nilai RB area penguatan pengawasan	71%	Belum dapat diukur	
		2. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	Level 3	Belum dilaksanakan	
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	Masih dalam proses pelaksanaan	
		2. Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM	Telah selesai penyusunan LAKIP 2020 dan telah selesai Penilaian Dokumen SAKIP Eselon II.	

Keterangan :



: Telah tercapai



: Dalam proses pelaksanaan



: Tidak tercapai

III.3. Hambatan dan Kendala

Pada Triwulan I Tahun 2021, dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal terdapat hambatan dan kendala, antara lain:

- 1) Penyesuaian kegiatan pengawasan dengan adanya revisi pemotongan anggaran masker;
- 2) Terdapat perubahan pada output form A yang terdapat di Aplikasi PP 39, sehingga sub kegiatan pada Inspektorat Jenderal tidak dapat di analisa realisasi keuangan dan realisasi fisiknya;
- 3) Terdapat SPTJB yang belum diinput nomor dan tanggal oleh Bagian Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal Karena belum terbitnya SP2D.
- 4) Pada Monev Tapkin Inspektorat Jenderal secara total sub kegiatan belum sesuai dengan POK, sehingga terjadi ketidaksesuaian total Pagu Anggaran.
- 5) Pandemi Covid-19 masih berlangsung, sehingga pelaksanaan pengawasan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada.
- 6) Adanya perubahan struktur organisasi di akhir Triwulan I yang mengakibatkan kurang optimalnya pendelegasian tanggung, pelaksanaan kegiatan serta penyusunan laporan kegiatan;
- 7) Beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan sesuai rencana karena adanya revisi kegiatan dan anggaran.

III.4. Langkah Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari adanya kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan di Triwulan I ini dan bertepatan dengan era *new normal*, maka Inspektorat Jenderal mengupayakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal sehingga realisasi anggaran di PP39 sesuai dengan realiasi anggaran sesungguhnya;
2. Berkoordinasi dengan Pusdatin untuk memperbaiki aplikasi PP 39 yang ada pada intranet;
3. Akselerasi realisasi program/kegiatan di lingkungan Inspektorat Jenderal agar terlaksana sesuai dengan perencanaan waktu yang ditetapkan pada awal tahun;

4. Berkoordinasi dengan semua pihak terkait melalui berbagai macam media baik online maupun secara langsung sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan tetap berjalan dengan lancar sesuai dengan target yang ditetapkan.
5. Masing-masing penanggung jawab kegiatan/koordinator kegiatan agar mengatur perencanaan kegiatan;
6. Koordinator kegiatan agar segera melaksanakan tahapan kegiatan sesuai dengan *timeline* yang telah disusun dengan memperhatikan keterkaitan pelaksanaan antar kegiatan;
7. Seluruh pegawai Inspektorat Jenderal agar memaksimalkan kebijakan *work from home* dengan mengerjakan tugas yang dapat dilakukan secara daring;

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian selama periode Triwulan I Tahun 2021 secara umum telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian sampai dengan Triwulan I Tahun 2021 (Januari-Maret) mencapai Rp 4,723,590,306, - atau 11.92 % dari total pagu anggaran sebesar Rp 39,643,630,000,-. Angka-angka capaian kinerja kegiatan tersebut merupakan nilai tertimbang dari kemampuan penyerapan anggaran dari total anggaran yang ada pada Inspektorat Jenderal.

Dalam pelaksanaan kegiatan sasaran kinerja dan keluaran belum dapat dicapai karena pada triwulan ini merupakan tahapan persiapan, namun pekerjaan rutin yang merupakan kegiatan pelayanan internal tetap dapat dilaksanakan tanpa adanya kendala yang berarti.

Untuk selanjutnya perlu koordinasi internal maupun eksternal untuk menjamin realisasi anggaran dan kegiatan sesuai dengan target.

Informasi capaian kinerja Triwulan I ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk evaluasi serta perbaikan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan berikutnya, agar target kinerja yang akan dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja TA 2021 dapat tercapai pada akhir tahun anggaran.

LAMPIRAN



Kegiatan Inspektorat Jenderal

Monitoring Capaian

Sasaran & Indikator

Pilih Unit Kerja

No.	Indikator	Target	TW I		TW II		TW III		TW IV		Real. Fisik	Real. Keu	Capaian
			T	R	T	R	T	R	T	R			
1. S1 - Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian													
S1.1 - Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal	1,4 Persen	13%	1%	22%	0%	32%	0%	38%	0%	16%	17%	100 Persen	
Pagu = Rp. 15.138.869.000													
S1.2 - Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	8 Persen	5%	0%	11%	0%	18%	0%	25%	0%	1%	1%	90 Persen	
Pagu = Rp. 1.508.653.000													
S1.3 - Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85 Persen	0%	0%	0%	0%	12%	0%	20%	0%	0%	8%	0,1 Persen	
Pagu = Rp. 488.132.000													
S1.4 - Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker	91,5 Persen	4%	2%	9%	0%	25%	0%	39%	0%	4%	4%	62 Persen	
Pagu = Rp. 8.612.259.000													
Total Pagu = Rp. 25.747.913.000													
2. S2 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik													
S2.1 - Nilai RB Area Penguatan Pengawasan	71 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100 Persen	
Pagu = Rp. 0													
S2.2 - Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	3 Level	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1 Level	
Pagu = Rp. 0													
Total Pagu = Rp. 0													

3. S3 - Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif

S3.1 - Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan 75 Persen 11% 2% 24% 0% 35% 0% 40% 0% 17% 18% 0 Persen

Pagu = Rp. 1.782.186.000

S3.2 - Capaian IACM Itjen 3 Level 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 Level

Pagu = Rp. 1.859.410.000

S3.3 - Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer) 77 Persen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 Persen

Pagu = Rp. 0

Total Pagu = Rp. 3.641.596.000

4. S4 - Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien

S4.1 - Sistem Informasi Pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh auditor 25 Persen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 75 Persen

Pagu = Rp. 44.160.000

S4.2 - Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku 55 Persen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 85 Persen

Pagu = Rp. 76.300.000

S4.4 - Tingkat perolehan Data dan informasi pengawasan yang memadai 90 Persen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 Persen

Pagu = Rp. 11.036.000

S4.3 - Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT 80 Persen 4% 2% 10% 0% 16% 0% 20% 0% 4% 2% 0 Persen

Pagu = Rp. 1.589.500.000

S4.5 - Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya 90 Persen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 Persen

Pagu = Rp. 27.400.000

S4.6 - Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen 91 Persen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 Persen

Pagu = Rp. 16.050.000

Total Pagu = Rp. 1.764.446.000

5. S5 - Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas

S5.1 - Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan 60 Persen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 Persen

Pagu = Rp. 68.200.000

S5.2 - Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/kefasihan sesuai dengan 75 Persen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 Persen

S4.1 - Sistem Informasi Pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh auditor	25 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	75 Persen
Pagu = Rp. 44.160.000												
S4.2 - Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku	55 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	85 Persen
Pagu = Rp. 76.300.000												
S4.4 - Tingkat perolehan Data dan informasi pengawasan yang memadai	90 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 Persen
Pagu = Rp. 11.036.000												
S4.3 - Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	80 Persen	4%	2%	10%	0%	16%	0%	20%	0%	4%	2%	0 Persen
Pagu = Rp. 1.589.500.000												
S4.5 - Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 Persen
Pagu = Rp. 27.400.000												
S4.6 - Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen	91 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 Persen
Pagu = Rp. 16.050.000												
Total Pagu = Rp. 1.764.446.000												
5. S5 - Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas												
S5.1 - Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	60 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 Persen
Pagu = Rp. 68.200.000												
S5.2 - Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	75 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 Persen
Pagu = Rp. 13.000.000												
S5.3 - Tingkat kepatuhan terhadap kode etik auditor	92 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 Persen
Pagu = Rp. 26.000.000												
S5.4 - Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	13%	0 Bulan Layanan
Pagu = Rp. 26.806.598.000												
Total Pagu = Rp. 26.913.798.000												
Dikelola oleh Kementerian Perindustrian												

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
INSPEKTORAT JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Masrokhan
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agus Gumiwang Kartasasmita
Jabatan : Menteri Perindustrian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Menteri Perindustrian



Agus Gumiwang Kartasasmita

Inspektur Jenderal



Masrokhan

**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2021**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN			
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,4 %
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	8 %
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	91,5 %
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai RB Area Penguatan Pengawasan	71%
		Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL			
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan Standar Pelaksanaan Pengawasan	75%
		Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM

No	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	Rp2.000.000.000
2	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	Rp2.000.000.000
3	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	Rp2.000.000.000
4	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	Rp2.000.000.000
5	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	Rp32.643.630.000

Total Anggaran Tahun 2021 : Rp40.643.630.000

(Empat Puluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Menteri Perindustrian,



Agus Gumiwang Kartasasmita

Jakarta, Januari 2021

Inspektor Jenderal

Masrokh